Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam

Muhammad Husni dan Fathul Wahab
Institut Agama Islam Al-Qolam Malang
Email: husninanang73@gmail.com

Abstract: *The existence of nasakh and mansukh in the determination of Islamic law is very important, because not always the law in one place is the same as the place and conditions in other places. It's just that in imposing nasakh and mansukh this is limited to the problems of shar'i law, while other than that it is not permissible such as the issue of aqidah or the points of worship and moral principles, such as justice, honesty, prohibition of shirk, killing, stealing and others etc .. Besides that, the determination of nasakh and mansukh is not permitted by using ijihad or the opinions of the scholars, but it is indeed pure from Allah Almighty contained in the Qur'an. However, there are two opposing groups namely those who support the existence of nasakh and mansukh in the Qur'an and groups who reject the existence of nasakh and mansukh in the Qur'an. The middle way taken is to compromise the two opposing groups by reviewing the terms understanding nasakh and mansukh. With this compromise, it is hoped that there will be no more opposition regarding nasakh and mansukh. For this reason the scholars set ways to know nasakh and mansukh strictly. Despite the pros and cons of nasakh and mansukh. Nasakh and mansukh have provided great lessons for Muslims including the development of tasyri 'towards the level and the desire for goodness and convenience for Muslims.*

Keywords: *Mansukh Nasakh, Islamic Sharia Law*

Abstrak: *Keberadaan nasakh dan mansukh dalam penetapan hukum Islam sangat penting, karena tidak selamanya hukum dalam satu tempat sama dengan tempat dan kondisi di lain tempat. Hanya saja dalam memberlakukan nasakh dan mansukh ini terbatas pada masalah-masalah hukum syar'i, sementara selain itu tidak diperbolehkan seperti masalah aqidah atau pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, membunuh, mencuri dan lain sebagainya.. Disamping itu penetapan nasakh dan mansukh tidak diperkenankan dengan menggunakan ijihad atau pendapat dari para ulama, tetapi memang murni dari Allah swt yang terdapat di dalam Al Qur'an. Namun begitu, terdapat dua golongan yang berlawanan yaitu golongan yang mendukung adanya nasakh dan mansukh di dalam Al Qur'an dan golongan yang menolak adanya nasakh dan mansukh dalam Al Qur'an. Jalan tengah yang diambil adalah dengan jalan mengkompromikan kedua golongan yang bersebrangan dengan meninjau kembali istilah pengertian nasakh dan mansukh. Dengan adanya kompromi ini diharapkan tidak ada lagi pertentangan mengenai nasakh dan mansukh. Karena itulah para ulama menetapkan cara-cara untuk mengetahui*

nasakh dan mansukh secara ketat. Meskipun terjadi pro kontra terhadap nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh telah memberikan hikmah yang besar bagi umat Islam diantaranya adalah Perkembangan tasyri` menuju tingkat dan menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam.

Kata Kunci: *Nasakh Mansukh, Hukum Syariat Islam*

Al Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Sebagai sumber utama Al Qur'an bersifat baku dan universal artinya keberadaan Al Qur'an tetap orsinil sepanjang masa dan tidak mengalami perubahan sedikitpun baik dari segi bahasa maupun dari segi makna. Al Qur'an selalu *up to date* terhadap perkembangan zaman, ini bukan berarti Al Qur'an menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, akan tetapi Al Qur'an menjadi barometer bagi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan sains dan teknologi sebagai puncak kebudayaan manusia harus menyelaraskan diri dengan Al Qur'an sehingga memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Kebudayaan yang menyelaraskan diri dengan Al Qur'an maka kebudayaan tersebut akan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Sedangkan Al Qur'an bersifat universal artinya bahwa syariat yang ditetapkan Al Qur'an berlaku untuk seluruh manusia yang tidak tersekat antara waktu dan ruang. Namun demikian hukum-hukum Al Qur'an kebanyakan masih bersifat *mujmal* yang membutuhkan interpretasi dari para ulama. Meskipun interpretasi yang dilakukan oleh ulama tersebut

terkadang terjadi perbedaan pandangan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pandangan adalah rahmat, yang menurut Imam Taufiq, menunjukkan beragamnya cara pandang manusia sebagai makhluk yang berakal, memahami simbol, intelek, berilmu pengetahuan dan normatif. (Imam Taufiq, 2001, p.135) Sebagai hukum utama dalam Islam, kajian terhadap Al Qur'an terus dilakukan oleh para ulama. Karena Al Qur'an tidak hanya sumber hukum tetapi juga sumber ilmu pengetahuan karena apabila semakin dikaji dan digali maka semakin dalam arti Al Qur'an itu sendiri. Kajian terhadap Al Qur'an tidak hanya terbatas pada masalah-masalah hubungan ayat satu dengan ayat lain, tempat diturunkannya ayat-ayat tersebut, tetapi juga ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang di dalamnya mengandung *nasakh* dan *mansukh*. Keberadaan *nasakh* dan *mansukh* itu sendiri telah menyebabkan terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada golongan ulama yang menerima *nasakh* dan *mansukh* itu sebagai dalam pemberlakuan hukum syariat. Ada pula golongan ulama yang menolak *nasakh* dan *mansukh*. *Nasakh* dan *mansukh* merupakan isu sentral dalam pembahasan makalah ini, karena

memahami Al Qur'an tidak terlepas dari permasalahan *nasakh* dan *mansukh* apalagi menyangkut permasalahan dalam menetapkan hukum.

Pengertian

Secara etimologis, kata *naskh* yang bentuk *isim failnya* "*nasikh*" dan *isim maf'ulnya* "*mansukh*", mempunyai arti yang beragam, antara lain : menghilangkan, menghapuskan, membatalkan. Yang berarti membatalkan atau memindah dari satu wadah ke wadah yang lain. Atau juga berarti penukaran dan penyalinan, (Quraish Shihab, 1994, p.143) penghapusan/pembatalan (*al-izalah* atau *al-ibthal*), pemindahan (*al-naql*), pengubahan/penggantian (*al-ibdal*), dan pengalihan (*al-tahwil* atau *al-intiqal*).⁵ Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka *nasikh* (*isim fa'il*) diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan *mansukh* (*isim maf'ul*) adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* dalam mendefinisikan *nasakh* secara terminologis. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada banyaknya pengertian *nasakh* secara etimologi sebagaimana dijelaskan di atas. Cakupan makna yang ditetapkan ulama *mutaqaddimin* di antaranya: 1) Pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian; 2) Pengecualian/pengkhususan hukum bersifat *'am/umum* oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya; 3) *Bayan* atau penjelasan yang

datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; 4) Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat (Moh. Nor Ichwan, p.108)

Di samping itu ada yang berpendapat bahwa istilah tersebut berarti pembatalan ketetapan hukum yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu oleh ketetapan lain yang berbeda akibat munculnya kondisi lain. Misalnya perintah agar kaum muslimin pada periode Makkah bersabar karena lemah telah di-*nasakh* oleh adanya perintah berperang pada periode Madinah karena kondisi mereka sudah kuat. Bahkan ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa sebelum Islam termasuk dalam pengertian *nasakh* (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997, p.16) Sementara menurut ulama *mutaakhirin*, *nasakh* adalah dalil yang datang kemudian, berfungsi untuk menggugurkan dan menghilangkan hukum yang pertama (Quraish Shihab, 2004, p.143) Dengan demikian ulama *mutaakhirin* mempersempit pengertian yang luas itu. Menurut mereka, *nasakh* adalah ketentuan hukum yang datang kemudian untuk membatalkan masa berlakunya hukum terdahulu. Artinya ketetapan hukum yang terdahulu tidak berlaku lagi dengan adanya ketetapan hukum yang baru (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, p.16) Atas dasar itu, dalil yang datang kemudian disebut *nasakh* (yang menghapus). Sedangkan hukum yang pertama disebut *mansukh* (yang terhapus). Sementara itu, penghapusan hukumnya disebut *nasakh* (Kahar Mansykur, 2002, p.135) Sementara itu, menurut az-

Zarqani, sebagaimana dinukil Moh. Nur Ichwan, yang dimaksud dengan terminologi “menghapuskan” dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seorang *mukallaf* dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri (Moh. Nur Ichwan, 2002, p.108) Definisi diatas apabila dijelaskan lagi, dapat kita tarik beberapa butiran-butiran makna yang tersirat, yakni: Dipastikan terjadi *naskh* apabila ada dua hal, yaitu *nasikh* dan *mansukh*. *Nasikh* harus turun belakangan dari *mansukh*, Menilai suatu ayat sebagai *pe-naskh* dan yang lain di-*naskh*-kan, apabila ayat-ayat yang kontradiktif itu tidak dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersama.³ Sedangkan syarat kontradiksi; adanya persamaan subjek, objek, waktu, syarat, dan lain-lain.⁴ Menurut al Qaththan, *nasakh* ialah mengangkat (menghapus) hukum syara’ dengan dalil hukum syara’ lain. Kata “hukum” di sini, menunjukkan bahwa prinsip “segala sesuatu hukum asalnya boleh”. Kata-kata dengan dalil hukum syara’” mengecualikan pengangkatan (penghapusan) hukum disebabkan kematian atau gila, penghapusan dengan *ijma’* atau *qiyas*. (Manna Khalil al-Qattan, 2001, p.285)

Kata *nasikh* (yang menghapus) maksud Allah seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 106 “*Dan tidaklah Kami menghapus suatu ayat.....*”. kata itu juga digunakan untuk ayat atau sesuatu yang dengannya *nasakh* dapat diketahui dan digunakan pula untuk hukum menghapuskan hukum yang lain. *Mansukh* adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus. (Manna

Khalil al-Qattan, 2001, p.286) Perlu dipahami bahwa terjadinya *nasikh mansukh* itu bukan berarti dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah terdapat kontradiksi, tetapi menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosiokultural penerima ajaran. Oleh sebab itu para ulama *ushul* menetapkan syarat kemungkinan terjadi *nasikh* dan *mansukh*, yaitu :*Nasikh* harus terpisah dari *mansukh*, *Nasikh* harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan *mansukh*, *Nasikh* harus berupa dalil-dalil syara’, *Mansukh* tidak dibatasi dengan waktu, *Mansukh* harus berupa hukum syara’, *Nasikh* wurudnya kemudian setelah *mansukh*’, Disamping itu perlu diketahui bahwa ada *Nash-Nash* yang sudah pasti yang tidak mungkin dibatalkan, yaitu :

1. *Nash* yang berisi pokok ajaran, baik berupa aqidah atau pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, membunuh, mencuri dan lain sebagainya.
2. *Nash* yang berisi hukum abadi atau selamanya berdasarkan pernyataan *Nash* itu sendiri
3. *Nash* yang berisi pemberitaan satu kejadian baik yang sudah lewat atau yang akan datang (Abdul Wahhab Khalaf, 1968, p.226 - 227)

Syarat-Syarat Nasikh Mansukh

Menurut al Qaththan dalam *nasakh* diperlukan syarat-syarat ; (1)

Hukum yang dimansukh adalah hukum syara' (2) Dalil penghapusan hukum tersebut adalah *khitab* syar'i yang datang kemudian dari *khithab* yang hukumnya dimansukh. (3) *Khitab* yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian itu tidak dinamakan dengan *nasakh* (Manna Khalil al-Qattan, 2001, p.285) Sedangkan menurut Abu Anwar memberikan batasan beberapa syarat yang diperlukan dalam *nasakh*, yaitu : Hukum yang mansukh adalah hukum syara'. *Nasakh* hanya terjadi pada perintah dan larangan. *Nasakh* tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah. Dalil yang dipergunakan untuk penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian. Dalil yang *mansukh* hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu. Sebab, jika demikian hukum akan berakhir dengan waktu tersebut (Abu Anwar, 2009, p.52) Sebagian ulama ada yang memperluas syarat-syarat terjadi *nasakh*, yaitu: a. Hukum yang terkandung pada *nasikh* bertentangan dengan hukum pada *mansukh*. Yang *mansukh* harus lebih awal dari *Nasikh*. Hukum yang di-*nasakh* mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. Hukum yang di-*nasakh* tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu. Hukum yang terkandung dalam *mansukh* telah ditetapkan sebelum munculnya *nasikh*. Status *nash nasikh* mesti sama dengan *nash mansukh*. Maka *nash* yang *zhanni*

tidak bisa *menasakh*-kan yang *qath'i* (Kadar M.Yusuf, 2010:117) *Nasakh* hanya terjadi pada perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*), baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan (*khabar bi ma'na al amr aw al nahy*), selama tidak berhubungan dengan akidah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalat. (Manna Khalil al-Qattan, p.287) Quraish Shihab, menambahkan lagi syarat *nasakh*, bahwa *nasakh* baru dilakukan bila : 1) Terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang, serta tidak dapat lagi dikompromikan; 2) Harus diketahui secara meyakinkan urutan turunnya ayat-ayat tersebut. Yang lebih dahulu dikatakan *mansukh*, dan yang datang kemudian disebut *nasakh* (Moh. Nor Ichwan, p.146)

Beberapa penjelasan mengenai pengertian dan syarat *nasakh* di atas, dapat disimpulkan *Nasakh* mempunyai empat rukun yaitu : 1) *Nasakh*, yaitu proses revisi atau penggantian hukum; 2) *Nasakh*, yaitu hukum pengganti, dalam hal ini Allah SWT, yang berhak secara mutlak untuk merevisi atau mengganti hukum tersebut; 3) *Mansukh*, yaitu hukum yang direvisi; dan 4) *Mansukh 'anhu*, yaitu orang yang dikenai hukum atau mukalla (Ishom Elsaha dan Saiful Hadi, 2005, p.555)

Pedoman Nasikh Mansukh

Pengetahuan tentang *nasakh* dan *mansukh* mempunyai fungsi dan

mafaat besar bagi para ulama, terutama para fuqaha, mufassir dan ahli ushul fikih, agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kabur. Oleh karena itu, terdapat banyak atsar yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata tentang firman Allah, "Dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebajikan yang banyak." (QS. Al-Baqarah :269),"yang dimaksud ialah (yang diberi ilmu tentang *nasikh dan mansukh*, *mutasyabihah*, *muqaddam* dan *mu'akharnya* serta haram dan halalnya (Manna Khalil al-Qattan, p.288) Untuk mengetahui *nasikh* dan *mansukh* ada beberapa cara berikut: Ada keterangan tegas atau pentransmisian yang jelas dari Nabi S.A.W, Konsensus (*ijma'*) umat bahwa ayat ini *nasikh* dan ayat itu *mansukh*. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Histori ayat dapat diketahui dari keterangan sahabat, yang bukan ijtihad sahabat itu sendiri. Misalkan sahabat itu mengatakan: "Ayat ini turun pada tanggal, bulan atau tahun sekian, sedangkan ayat ini turun pada tanggal, bulan atau tahun sekian, jadi ayat ini lebih kemudian dari ayat itu". *Nasikh* tidak dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad, pendapat mufassir atau kontradiksi dalil-dalil secara lahiriyah atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi. (Manna Khalil al-Qattan, p.288) Ketiga persyaratan itu merupakan faktor yang sangat menentukan adanya *nasakh* dan *mansukh* dalam al-Quran. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *nasakh mansukh* hanya terjadi dalam lapangan hukum,

dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat asal (pokok). Sedangkan kedudukan nasakh merupakan salah satu bentuk interpretasi hukum dalam upaya menghadapi ayat atau hadits yang tampak kontradiktif selain dari tarjih atau taksis dalam disiplin ilmu ushul Fiqh. Kuncinya terletak pada soal historis yang menyangkut kedua ketentuan hukum tersebut. Faktor *azbabun nuzul* ada dalam tingkat ini untuk mengetahui mana ayat yang datang terdahulu dan ayat yang datang kemudian. (Hasan Asyari Ulama`I, 2016, p.13) Menurut Yusuf Qardhawi, setidaknya ada tiga kecenderungan dalam masalah nasakh, yaitu : 1) Ada yang meluaskan diri dalam mengklaim adanya nasakh dalam al-Quran dan berpendapat bahwa sekian dalam surat sekian dinasakh, sementara tidak ada dalil yang kuat terhadap pe-nasakhan itu; 2) Sebagai antithesis dari mereka, ada yang mengingkari sama sekali adanya nasakh dalam al-Quran; dan 3) Ada pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasakh, jika dalil yang sahih dan jelas, yang meyakinkan akal dan menenangkan hati (Yusuf Qardhawi, 1999, p.467)

Pandangan Para Ulama Tentang *Nasikh Mansukh*

Pembahasan tentang *nasakh* dan *mansukh* yang muncul dalam kajian ilmu tafsir merupakan masalah yang mengandung perdebatan di kalangan para ulama. Kontroversi yang timbul bertolak dari bagaimana memahami dan menghadapi ayat-ayat Al Qur'an yang pada lahirnya kelihatan saling berlawanan. Segolongan ulama

berpendapat bahwa ada ayat-ayat yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan dan dengan demikian ada *nasakh* dalam Al Qur'an. Sebaliknya, segolongan ulama lainnya berpendapat bahwa ayat-ayat yang dikatakan tampak bertentangan bisa dikompromikan dan dengan demikian tidak ada *nasakh* dalam Al Qur'an. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, p.17)

- a. kelompok ulama yang mendukung *nasakh* dan *mansukh*

Salah satu ayat yang menjadi basis pembangunan teori *nasakh* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut dijadikan dasar naqli bagi mayoritas ulama yang mendukung adanya *nasakh* dalam al-Quran. Mayoritas ulama tanpa keraguan menetapkan ayat-ayat yang termasuk *nasakh* dan *mansukh* tetap berlaku, akan tetapi segi hukum yang berlaku menyeluruh sampai waktu tertentu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh syara'. Jadi menurut mereka, *nasikh mansukh* bisa diterima oleh akal dan telah terjadi dalam

hukum syara' sesuai dalil di atas. Selain dalil *naqli* di atas, jumhur ulama pendukung *nasakh* juga mendasarkan dalil *naqli*. Mereka berpandangan perbuatan Allah itu mutlak, tidak tergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Ini karena, Allah lebih mengetahui kepentingan hambanya (Manna Khalil al-Qattan, p.331). Pendapat lain yang mendasari mayoritas ulama tentang teori *nasakh* adalah penetapan perintah-perintah tertentu kepada kaum muslimin di dalam al-Quran yang menurut Rosihan Anwar, ada yang bersifat sementara dan ketika keadaan berubah perintah tersebut dihapus dan diganti dengan perintah baru lainnya. Namun, karena perintah-perintah itu kalam Allah, harus dibaca sebagai bagian dari al-Quran. (Rosihan Anwar, 2007, p.163) Persoalan *nasakh* bagi kelompok pendukungnya merupakan salah satu cara menyelesaikan beberapa dalil tersebut. Apabila tidak bisa dikompromikan, salah satunya *dinasakh* atau dibatalkan. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa dalam al-Quran secara implisit memang mengandung konsep *nasakh*. Oleh karena itu jika seseorang ingin menafsirkan al-Quran, menurut M. Abu Zahrah, harus terlebih dahulu mengetahui tentang *nasikh* dan *mansukh* (Muhammad Abu Zahrah,

2008, p.120) Menurut kelompok ini keberadaan *nasakh* dalam al-Quran selain memiliki dasar dari al-Quran, secara praktis juga nyata dalam sejarah Islam, dan *nasakh* disebut secara eksplisit di dalam al-Quran. Rachmat Syafe'i memberikan batasan terhadap ayat yang *dinasakh*, yaitu : (1) ayat al-Quran yang konsekwensi hukumnya saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan, (2) harus diketahui secara meyakinkan urutan turunya ayat-ayat tersebut, yang lebih dahulu ditetapkan sebagai *mansukh* dan yang datang kemudian sebagai *nasikh* (Rachmat Syafe'i, 2006, p.94) Jumhur ulama, antara lain Imam Syafi'i mengakui adanya *nasakh* dalam Al Qur'an. Menurut mereka, ayat yang *dinasakh* adalah ayat Al Qur'an yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum. disamping alasan nash-nash itu, menurut mereka ada ayat-ayat yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. (Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, p.16)

Munawir Sjadzali juga sependapat dengan kelompok yang menyatakan adanya *nasakh*, sehingga ia menggunakan metode klasik yang disebut dengan *nasakh* tersebut. Namun dalam praktiknya, Munawir Sadjali menggunakannya dengan cara yang berbeda dengan ulama klasik, sehingga menghasilkan pemahaman yang radikal dan

memberikan peran yang luas kepada akal untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum atau petunjuk yang telah diberikan dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis nabi Muhammad saw. (Munawir Sjadzali, 1997, p.47) Sayyid Quthb dalam tafsirnya "*Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*" berpendapat bahwa ayat 106 dari surat al-Baqarah itu diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang yahudi bahwa Nabi tidak konsisten, baik mengenai kepindahan kiblat dari masjid al-Aqsha ke Masjid al-Haram, maupun perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang terjadi akibat pertumbuhan masyarakat Islam, dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang (Sayyid Quthb, p.101-102) Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa *nasakh* (pergeseran atau pembatalan hukum/petunjuk) itu dapat terjadi tidak hanya pada zaman nabi Muhammad saw. tetapi juga sepeninggal beliau kalau memang kondisi dan situasinya telah berubah. Di samping itu akal budi manusia juga dapat berperan sebagai alat yang dapat *menasakh* wahyu atau membatalkan/menggeser hukum baik yang termaktub dalam ayat-ayat al-Quran maupun Hadis Nabi saw. selama hal tersebut berkaitan dengan masalah mu'amalah (kemasyarakatan). Dengan demikian, bukan berarti al-Quran dan Hadits yang diubah,

bukan pula syari'at yang diubah, tetapi pengetrapannya yang dapat diubah (Munawir Sjadzali, 1985, p.87) Pandangan Munawir Sadzali, yang menyatakan bahwa *nasakh* dapat terjadi sepeninggal nabi Muhammad saw., ini jelas-jelas bertentangan dengan ulama yang berpegang pada pandangan klasik yang menyatakan bahwa naskh hanya terjadi pada masa nabi Muhammad saw. atau masa tasyri'. Demikian juga pendapatnya yang membolehkan akal budi (rasio) manusia sebagai alat yang dapat menaskh wahyu Allah bertentangan dengan pendapat umum Ahmad Azhar Basyir, salah seorang tokoh Muhammadiyah misalnya mengatakan bahwa yang berhak *menasakh* hukum-hukum Allah hanya Allah sendiri. Selain Allah tidak berhak *menasakh* hukum-hukum Allah. Setelah al-Quran selesai diwahyukan, *nasikh mansukh* sudah berhenti. Semua pernyataan fuqaha' dan mufassirin tentang kemungkinan terjadinya *nasakh*, tertuju pada kurun waktu semasa al-Quran belum selesai diwahyukan. Oleh karenanya jalan *nasakh* tidak dapat dipergunakan untuk membahas kemungkinan reaktualisasi ajaran Islam, setelah al-Quran diturunkan empat belas abad yang lalu. (Ahmad Azhar Basyir, p.56) Pernyataan senada juga

dikemukakan oleh Ali Yafie salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa perubahan hukum-hukum (*taghayyur al-ahkam*) melalui jalur *nasakh* terjadi pada tingkat syariah (al-Quran dan Sunnah) saja. Dengan berakhirnya periode tasyri (dengan wafatnya penerima wahyu yaitu Rasulullah saw.) maka perubahan-perubahan hukum Islam melalui jalur *nasakh*, sudah berakhir juga. Maka merujuk kepada naskh dalam rangka upaya *revision of the law* dalam hukum Islam tidak pada tempatnya. (Ali Yafie, 1998, p.100) Berdasarkan pernyataan di atas, tampaknya M. Quraish Shihab memperbolehkan adanya pergantian hukum (*nasakh*) oleh manusia terhadap kasus yang dihadapinya dengan beralih pada ayat hukum yang dianggap cocok sesuai kasus yang dihadapinya. Semua ayat al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat/orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Ayat hukum yang tidak lagi berlaku baginya, tetapi dapat berlaku bagi orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula (M. Quraish Shihab, p.149-150)

- b. Ulama yang menolak *nasakh mansukh*
Golongan ulama yang menolak adanya *nasakh* dalam al-Quran berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang kelihatan

bertentangan sehingga tidak perlu dinasakh. Kelompok penolak yang dipelopori oleh Abu Muslim al-Isfahani, menyatakan bahwa dalam al-Quran tidak terdapat *nasakh*. Jika mengakui adanya *nasakh* berarti mengakui adanya kebatilan dalam al-Quran. Abu Muslim al-Isfahani mendasarkan argumentasinya pada al-Quran surat Fushilat ayat 42

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Hukum-hukum yang dibawa al-Quran bersifat abadi dan universal. Jadi tidak layak kalau di dalam al-Quran terdapat *nasakh*. Lebih lanjut abu Muslim al-Isfahani, sebagai mana dikutip Amir Syarifuddin, mengemukakan argumentasi sebagai berikut : Suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah karena adanya *maslahat* atau *mafsadat* pada sesuatu yang dikenai hukum itu. Sesuatu yang mengandung *maslahat* tidak mungkin beralih menjadi *mafsadat*. Kalam itu bersifat *qadim*, dalam arti telah ada sejak dahulu (*azali*) sesuatu yang bersifat *qadim* tidak mungkin dicabut. (Amir Syarifuddin, 2007, p.229) Sehingga jelas, al-Isfahani tidak setuju adanya *nasakh*. Al-Isfahani setuju

menginterpretasikan ayat yang secara *zhahir* terjadi kontradiksi dengan jalan *takhsis* (pengkhususan), untuk menghindari adanya *nasakh* atau pembatalan, al-Isfahani berpendapat bahwa pembatalan hukum dari Allah mengakibatkan kemustahilan-Nya, yaitu : Ketidaktahuan, sehingga perlu mengganti atau membatalkan satu hukum dengan hukum lainnya. b. Jika itu dilakukan Allah, berarti Dia melakukan kesia-siaan dan permainan belaka. (M. Quraish Shihab, p.144) Berbeda dengan al-Isfahani yang cenderung kepada *takhsis*, Muhammad Abduh menolak adanya *nasakh*, dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya *tabdil* (dalam pengertian: pengalihan, pemindahan ayat hukum dengan ayat hukum lainnya). Dalam arti bahwa semua ayat al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pengalihan hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. (Rachmat Syafe'i, 2006, p.88)

Dengan demikian ayat hukum yang tidak berlaku baginya, tetap berlaku bagi orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka. Dalam perspektif hikmah, pemahaman semacam ini menurut Quraish Shihab akan sangat membantu dakwah Islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam. (M. Quraish

Shihab, p.148) Kendatipun uraian diatas telah dipaparkan, namun terdapat pendapat tentang *nasakh*, yang dalam masalah ini terbagi pada beberapa golongan: Orang yahudi, menurut mereka *naskh* tidak bisa diakui, karna *naskh* mengandung konsep *bada'*, sedangkan *bada'* adalah muncul setelah tersembunyi. Mereka berpendapat *naskh* adakalanya tanpa hikmah, dan itu mustahil bagi Allah. Dan adakalanya karna suatu hikmah, tetapi hikmah itu muncul setelah sembunyi, yakni sebelumnya tidak nampak oleh Allah Kalangan Syi'ah Rafidhah, mereka sangat berlebihan dan bahkan memperluas ruang lingkup dalam menetapkan (al Qaththan, p.289-2991) Abu Muslim al Ashfahani, menurutnya *naskh* secara akal dapat saja terjadi, tetapi menurut *syara'* *naskh* tidak bisa terjadi, Jumhur ulama, *naskh* adalah suatu yang dapat diterima secara akal dan telah terjadi pula dalam hukum-hukum *syara'*, berdasarkan dalil-dalil: 1)Perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Allah boleh saja memerintahkan sesuatu pada satu waktu dan melarangnya pada waktu lain. 2)*Nash-nash* al Qur'an dan Sunnah menunjuk pada kebolehan *nasakh* dan terjadinya. Sebenarnya para ahli al Qur'an mengambil sikap yang berbeda-beda terhadap masalah ini. *Pertama* menolak teori

nasakh dengan alasan tidak ada pertentangan antara ketentuan satu ayat dengan ayat lainnya dalam al Qur'an yang tidak dapat diselesaikan dengan cara dikompromikan dengan cara al *jami'* atau dengan *takhsisi*. *kedua*, memodifikasi teori *nasakh* dalam arti penghapusan dan pembatalan sebab *nasakh* merupakan penggantian satu syari'at kepada syari'at lain yang lebih sesuai sehingga mudah diterima. Penggantian hukum dengan hukum baru karena disebabkan oleh faktor kondisi dan situasiasi yang memang berbeda. *Ketiga*, melakukan dekonstruksi teori *nasakh*. Sikap ini merupakan pengakuan adanya *nasakh mansukh* dalam al Qur'an. Sikap ini didasarkan pada pemikiran bahwa *nasakh* merupakan suatu kebenaran historis yang sudah saatnya untuk ditinggalkan. Ditinggalkan bukan berarti pengingkaran tetapi penghapusan model teori *nasakh* itulah yang tidak dapat diterima untuk situasi sekarang ini. (Aksin Wijaya, 2009, p.137) Menurut Muhammad Thaha, *nasakh* bukan penghapusan hukum, melainkan sebagai penundaan hukum sambil menunggu waktu yang tepat. Menurut syariat Islam merupakan syariat yang sempurna dan kesempurnaannya terletak pada kemampuannya untuk berkembang. Ia melingkupi potensi-potensi kehidupan masyarakat baik individu

maupun sosial, dan ia mampu mengarahkan kehidupan tersebut ke dalam tahap-tahap kemajuan yang berlangsung terus-menerus. Kehidupan senantiasa berjalan menuju Allah dalam perjalanan kembalinya. Pertemuan dengan penciptanya merupakan keniscayaan yang telah ditetapkan oleh tahapan syariat yaitu *syariah*, *tariqat* dan *haqiqat*. (Aksin Wijaya, 2009, p.138) Menurut Thaha, perkembangan syariat Islam sebenarnya hanyalah perpindahan dari satu ayat ke ayat lain, dari ayat yang sejalan dengan situasi masa abad VII, beralih kepada ayat yang sejalan atau dianggap lebih tepat untuk kondisi waktu sekarang. Oleh karena itu ketika ayat-ayat Madaniyah yang pada abad VII menasakh ayat-ayat Makkiyah dan telah menjalankan fungsinya tidak layak untuk situasi baru abad XX. Ayat-ayat yang layak untuk situasi sekarang adalah ayat-ayat Makkiyah yang berisi pesan Islam paripurna yang karena situasi dan kondisi ia belum bisa diterima masyarakat Makkah. (Aksin Wijaya, 2009, p.138) Diantara ulama yang menolak *Nasakh* dan *Mansukh* dalam Al Qur'an adalah Abu Muslim Asfahami, Imam Ar Razi, Muhammad Abduh, Rashid Redha, Dr. Taufiq Sidqy, Muhammad Khudhari Bek. Alasan penolakan mereka didasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 106 ayat yang sama yang

digunakan oleh pendukung *Nasakh* dan *Mansukh* dengan perbedaan penafsiran. Alasan-alasan mereka adalah sebagai berikut : 1) Kandungan Surat Al Baqarah ayat 106 oleh kelompok pendukung *Nasakh* dan *Mansukh* dijadikan sebagai argument adanya nasakh dalam Al Qur'an, menurut mereka ditujukan kepada kaum Yahudi yang mengingkari Al Qur'an atau merujuk pada wahyu yang diturunkan sebelum Al Qur'an yang akhirnya digantikan oleh Al Qur'an. Artinya, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya diganti dengan yang lebih baik yaitu Al Qur'an. Menurut mereka, kalau Al Qur'an benar-benar datang dari Allah swt, maka pasti tidak akan berbeda dari isi kitab-kitab sebelumnya. Untuk itulah Allah menjawab bahwa Dia lebih tahu apa yang maslahat buat hamba-hamba-Nya untuk setiap zaman 2) Jika dalam Al Qur'an ada ayat yang mansukh berarti dalam Al Qur'an berbarti terdapat kesalahan dan saling berlawanan, padahal Al Qur'an sendiri menegaskan : "tidak datang kepada Al Qur'an kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya.." (QS.41:42),3) Rasulullah saw sendiri tidak pernah mengatakan adanya *nasakh* dalam Al Qur'an. Seandainya ada sudah tentu ia akan menjelaskannya 4) Hadis-hadis yang dikatakan oleh pendukung *nasakh* dinilai sebagai *penasikh* Al Qur'an

bukanlah hadis mutawatir melainkan hadis ahad yang tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi hujjah dalam menetapkan hukum sesuatu, 5) Dikalangan pendukung nasakh sendiri tidak ada kesepakatan dalam menentukan jumlah ayat-ayat yang mansukh. (Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, p.18)

Jalan terbaik untuk mengkompromikan kedua kelompok tersebut yaitu dengan jalan meninjau kembali pengertian istilah *nasakh* yang dikemukakan oleh ulama. Untuk usaha ini, pemikiran Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an dapat dijadikan sebagai titik tolak. Ia menolak adanya nasakh dalam pengertian "pembatalan", tetapi ia dapat menerima dalam pengertian *at-tabdil* (penggantian/pengalihan/pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain). Dengan demikian pengertian istilah *nasakh* adalah pergantian atau pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain, dalam arti semua ayat Al Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiktif dan yang dibatalkan. Hanya saja terjadi pergantian hukum bagi masyarakat/orang tertentu karena adanya kondisi yang berbeda. Namun demikian, ayat yang tidak berlaku bagi masyarakat dalam satu kondisi sama dengan kondisi mereka semula. Pemahaman demikian akan sangat membantu dalam pengembangan hukum Islam,

sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap tetap diberlakukan oleh mereka yang kondisinya sama atau serupa dengan kondisi umat Islam pada awal perkembangan Islam. (Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, p.19)

Meskipun nasakh mansukh memiliki cakupan yang banyak. Terhadap hal yang demikian ini para ulama memiliki sikap yang berbeda-beda : 1) Ada yang berlebihan, sehingga ia memasukkan ke dalam kelompok *nasakh* sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk di dalamnya, 2) Ada yang berhati-hati, dengan mendasarkan masalah *nasakh* ini hanya pada penukilan yang shahih semata. (Manna Khalil al-Qattan, p.299)

Sumber kekaburan tersebut bagi mereka yang berlebihan, cukup banyak. Yang terpenting diantaranya ialah : Menganggap *takhshish* juga sebagai *nasakh*, Menganggap bayan (penjelasan) sebagai *nasakh*, Menganggap suatu ketentuan yang disyariatkan karena sesuatu sebab yang kemudian sebab itu hilang (dan secara otomatis ketentuan itu pun menjadi hilang) sebagai *mansukh*. Misalnya perintah bersabar dan tabah terhadap gangguan orang kafir pada masa awal da'wah ketika umat Islam masih lemah dan minoritas. Menurut mereka, perintah itu dihapuskan dengan ayat-ayat perang. Padahal sebenarnya yang pertama,

yakni kewajiban bersabar dan tabah terhadap gangguan tetap berlaku di saat umat Islam dalam keadaan lemah dan minoritas. Sedang dalam keadaan mayoritas dan kuat, umat Islam wajib mempertahankan akidah melalui perang. Dan itulah hukum kedua yang berdiri sendiri, Menganggap tradisi jahiliyah atau syariat umat terdahulu yang dibatalkan Islam, sebagai *nasakh*. Misalnya, pembatasan jumlah istri dengan empat dan legalisasi hukum qishas dan diyat, sedang bagi bani Israil hanya berlaku hukum qishas saja, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Hal ini bukanlah *nasakh*, melainkan pembatalan (*al-Bara'ah Al-Ashliyah*) (Manna Khalil al-Qattan, p.230)

Bentuk Dan Macam-Macam Nasakh Dalam Al Qur'an

Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, nasakh dibagi menjadi :

- a. *Nasakh sharih* yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya ayat tentang perang pada surata al anfal ayat 68

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu,

niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti

Ayat ini menurut jumhur di *nasakh* oleh ayat yang mengharuskan satu orang mukmin melawan dua orang kafir pada ayat 66 surat yang sama

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ
فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا
أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

- b. *Nasakh Dzimmi*, yaitu jika terdapat dua *nasakh* yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian dihapus

ayat yang terdahulu. Seperti surat al Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini dinasakh dengan hadis yang berbunyi : la washiyyah li waris

- c. Nasakh kully yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contohnya ketentuan iddah empat bulan sepeuh hari pada surat al Baqarah 234 di nasakh oleh ketentuan iddah satu tahun pada ayat 240 pada surat yang sama

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

- d. Nasakh Juz'i yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu atau menghapus hukum yang bersifat muthlaq . dengan hukum yang muqayyad contoh surat an nur ayat 4 dengan ayat 6 surat yang sama

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka

deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik

Ayat tersebut di nasakh dengan ayat 6 pada surat yang sama

الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ
شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya ulama membaginya menjadi tiga yaitu:

- a. Penghapus terhadap hukum dan bacaan (*tilawah*) secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan tidak dibenarkan diamalkan. Misalnya tentang hadis tentang saudara sesusuan sebanyak sepuluh isapan. Ketetapan ini kemudian dinasakh menjadi lima isapan
- b. Penghapusan terhadap hukumnya saja sedangkan bacaannya tetap ada. Contohnya ajakan para penyembah berhala dari kalangan musyrikin kepada umat Islam untuk saling bergantian dalam beribadah, telah dihapus oleh ketentuan

ayat *qital* (peperangan) tetapi bunyi teknya tetap ada

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku"

Contoh lainnya tentang sedekah dalam surat mujadilah ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ
الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةٌ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ
لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini dinasakh dengan ayat 13 surat yang sama

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha

*Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²

- c. Penghapusan terhadap bacaannya saja sedangkan hukumnya tetap berlaku Adapun dari sisi otoritas mana yang berhak menghapus sebuah *nasakh* para ulama membagi *nasakh* ke dalam empat macam yaitu :
Nasakh al Qur'an dengan al Qur'an, *Nasakh* al Qur'an dengan sunnah. Bagi kalangan Hanafiyah nasakh semacam ini diperkenankan bila sunnahnya itu mutawatir atau masyhur. Tetapi pendapat ulama-ulama Hanafiyah ini ditentang oleh mayoritas ulama ushul fiqh. Bagi mereka apap pun jenis sunnah yang akan menghapus ketentuan-ketentuan al Qur'an tetap tidak diperkenankan *Nasakh* Sunnah dengan al Qur'an. Mayoritas ulama nasakh semacam ini diperkenankan, *Nasakh* sunnah dengan sunnah. Menurut al Qathtan, pada dasarnya ketentuan nasakh dalam *ijma'* dan *qiyas* tidak diperkenankan. Persoalan lebih jauh dalam masalah *nasikh-mansukh* ini ialah soal *nasikh-mansukh* antara Al Qur'an dengan sunnah. Adanya nasikh mansukh antara satu ayat yang membatalkan ketentuan hukum dalam Al Qur'an dengan lain ayat yang juga memuat ketentuan hukum dalam soal yang sama adalah satu hal yang tidak diperselisihkan lagi. Demikian pula adanya *nasikh-mansukh* antara hadis yang memuat ketentuan hukum

dalam soal yang sama merupakan satu hal yang tidak diperselisihkan lagi. Masalah yang menimbulkan perselisihan pendapat diantara para ulama ialah adanya nasikh mansukh silang antara Al Qur'an dengan sunnah. Jika disimak alasan masing-masing yang menjadi perbedaan pendapat ialah pandangan masing-masing tentang kedudukan hirarki Al Qur'an dan sunnah dalam syariat itu sendiri (Sukardi KD, 2002, p.173) Dalam kaitan hirarki Al Qur'an dan sunnah, ada semacam kesepakatan bahwa dalam *nasikh-mansukh* kedua unsurnya harus sama tingkatannya dan sama nilai dan sifatnya. Jalan pikiran seperti ini terdapat juga di kalangan ahli hukum bahwa suatu peraturan hukum tidak dapat dicabut dengan peraturan hukum lainnya yang lebih rendah tingkatannya. Demikian juga lembaga yang mengeluarkan peraturan hukum menjadi factor pertimbangan. Berdasarkan pemikiran ini, ada satu hal yang perlu dicatat bahwa setelah Rasulullah saw wafat, maka tidak ada lagi *nasakh-mansukh* terjadi pada syariat (Sukardi KD, 2002, p.173)
Jenis *nasikh-mansukh* yang diuraikan di atas memang segi formalnya. Jenis lain yang menyangkut segi materialnya, ada yang bersifat eksklusif (*sharih*) dan inklusif (*dhanni*). Untuk yang bersifat eksklusif (*sharih*), nasikh itu langsung

menjelaskan mansukhnya. Ketentuan yang nasikh di tetapkan secara jelas seperti halnya contoh dari Al Qur'an di atas. Sedangkan contoh sunah misalnya hukum ziarah kubur. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah melarang ziarah kubur sekarang diperbolehkan (Sukardi KD, 2002, p.173) Masalah *naskh* bukalan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin ilmu tafsir dan ilmu ushul fiqh. Karena itulah *naskh* merupakan *techniserterm* dengan batasan pengertian yang baku. Dalam kaitan ini Imam Subki menerangkan adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan *naskh* : apakah ia berfungsi mencabut (*raf*) atau menjelaskan (*bayan*). Ungkapan Imam Subki ini dapat dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut jenis-jenis *naskh* yang diuraikan di atas. Jika ditinjau dari segi formalnya maka fungsi pencabutan itu lebih nampak. Tapi bila ditinjau dari segi materinya, maka fungsi penjelasannya lebih menonjol. Meski demikian pada akhirnya dapat dilihat adanya suatu fungsi pokok bahwa *naskh* merupakan salah satu interpretasi hukum. (Sukardi KD, 2002, p.173)

Hikmah *Nasakh Mansukh*

Al Maragi dalam kitab tafsirnya melihat adanya hikmah keberadaan *nasakh* dengan

menyatakan : 'Sesungguhnya hukum-hukum itu tidak diundangkan kecuali untuk kepentingan manusia. Hal ini dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Jika suatu hukum diundangkan karena dirasakan perlu adanya hukum itu, kemudian keperluan itu berakhir, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang lebih sesuai dengan waktu itu. Dengan demikian hukum menjadi lebih baik dari yang semula atau sama dari segi manfaat untuk hamba-hamba Allah.' (Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, p.17) Manna Khalil al-Qattan menjelaskan tentang hikmah adanya *nasakh* dalam al-Quran, yaitu : 1) Menjaga keselamatan hamba Allah; 2) Perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat Islam; 3) Cobaan dan ujian bagi Mukallaf untuk mematuhi atau sebaliknya; dan 4) menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam. Sebab jika *nasakh* itu beralih kepada hal atau perkara yang lebih berat maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih kepada hal atau perkara yang lebih ringan maka *nasakh* mengandung kemudahan dan keringanan. (Manna Khalil al-Qattan, p.338)

Kesimpulan

Nasakh adalah menghilangkan, menghapuskan, membatalkan ayat dengan ayat yang lain karena adanya dalil yang menunjukkannya. *Nasakh* terjadi pada ayat yang berlawanan atau kontradiksi dengan ayat yang lain

yang sulit untuk dikompromikan. *Nasakh* dan *mansukh* hanya berlaku terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syar'i yaitu terjadi pada perintah dan larangan. *Nasakh* tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah

Berkaitan dengan *nasakh* dan *mansukh* dikalangan ulama terdapat dua kelompok yang berseberangan. Pertama, golongan ulama yang menerima dan mendukung terjadinya *nasakh* dan *mansukh*. Kedua, golongan ulama yang menolak terjadinya *nasakh* dan *mansukh*. Terhadap kedua kelompok yang berbeda pendapat ini, diperlukan kompromi karena perbedaan kedua golongan ini memiliki implikasi terhadap ketetapan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kompromi tersebut dilakukan dengan meninjau kembali istilah *nasakh* dan *mansukh* yang digunakan oleh ulama. Pemikiran Muhammad Abduh, mungkin dapat dijadikan jalan tengah terhadap perbedaan pendapat tersebut, meskipun Muhammad Abduh termasuk golongan yang menolak *nasakh* *mansukh*. Pemikiran tersebut adalah mengubah istilah *nasakh* *mansukh* sebagai penggantian/pengalihan/pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain.

Adapun bentuk-bentuk *nasakh* dan *mansukh* meliputi (1) *Nasakh sharih* (2) *Nasakh Dzimmi* (3) *Nasakh kully* (4) *Nasakh Juz'i*. Sedangkan otoritas mana yang berhak menghapus sebuah *nasakh* para ulama membagi *nasakh* ke dalam empat macam yaitu (1) *nasakh* al Qur'an dengan al Qur'an (2)

nasakh al Qur'an dengan sunnah (3) *nasakh* Sunnah dengan al Qur'an (4) *nasakh* sunnah dengan sunnah

Daftar Pustaka

- Aksin Wijaya, 2009, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an : Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Al-Qattan , Manna Khalil, 2001, *Studi Ilmu-ilmu al-Quran*, terj. Mudzakir, Yogyakarta : Pustaka Lentera
- Amir Syarifuffin, 2007, *Ushul Fiqh*, jilid I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Anwar, Abu, 2009, *Ulumul Quran, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Amzah
- Anwar, Rosihan, 2007, *Ulumul Quran*, Bandung : Pustaka Setia
- Basyir, Ahmad Azhar, 1998, *"Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan"*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka
- Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, 1997, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ictiar Baru Van Hoeve
- Elsaha, Ishom dan Hadi, Saiful, 2005, *Sketsa al-Quran : Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam al-Quran*, Jakarta : Lista Fariska
- Hasan Asyari Ulama`I, 2016, *Konsep Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Quran*, Jurnal Didaktika Islamika Volume 7 Nomor 1 Pebruari

- Ichwan, Moh. Nor, 2002, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, Semarang : RaSail Media Group
- Khalaf, Abdul Wahhab, 1968, *Ilmu Ushul Fiqh*, ttp: Dar al-Kuwaitiyyah
- Lihat, Jalaluddin Rahmat dkk. 2002, *Belajar Mudah 'Ulum Al-Qur'an : Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an*, Editor : Sukardi KD Jakarta, Lentera
- Mansykur, Kahar, 2002, *Pokok-pokok Ulumul Qur'an*, Jakarta : Rineka Cipta
- Qardhawi , Yusuf, 1999, *Berinteraksi dengan al-Quran*, Jakarta : Gama Insani Press
- Quthb , Sayyid, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-'Arabiyyah, t.th
- Rachmat Syafe'i, 2006, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung : Pustaka Setia
- Shihab, Quraish, 1994, *Membumikan al-Qur'an* Bandung : Mizan
- Shihab, Quraish, 2004, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Bandung : Mizan
- Sjadzali , Munawir, 1985, *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*, Jakarta: Depag RI,
- Sjadzali , Munawir, 1997, *Ijtihad Kemanusiaan.*, Jakarta : Paramadina
- Syafe'i , Rachmat, 2006, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung : Pustaka Setia
- Taufiq, Imam. 2001, *Maqamat dan Ahwal, Tinjauan Metodologis*, dalam *Tasawuf dan Krisis*, Yogyakarta :
- Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Walisongo Press,
- Yafie, Ali, 1998, *Antara Ketentuan dan Kenyataan?*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Yusuf, Kadar M., 2010, *Studi al Qur'an*, Jakarta: Amzah
- Zahrah, Muhammad Abu, 2008, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus